



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Pengaruh Wahhabisme terhadap Keterlibatan
Arab Saudi dalam Kontestasi dengan Iran di Kawasan
Timur Tengah pada Peristiwa *Arab Spring* (2011-2016)**

Skripsi

Oleh

Maulana Yusuf Hasan

6091801032

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Pengaruh Wahhabisme terhadap Keterlibatan
Arab Saudi dalam Kontestasi dengan Iran di Kawasan
Timur Tengah pada Peristiwa *Arab Spring* (2011-2016)**

Skripsi

Oleh

Maulana Yusuf Hasan

6091801032

Pembimbing

Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Maulana Yusuf Hasan
Nomor Pokok : 6091801032
Judul : Analisis Pengaruh Wahhabisme terhadap Keterlibatan Arab Saudi dalam Kontestasi dengan Iran di Kawasan Timur Tengah pada Peristiwa *Arab Spring* (2011-2016)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 20 Juni 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

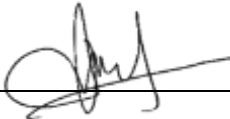
Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Sekretaris
Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc :

: 

Anggota
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulana Yusuf Hasan
NPM : 6091801032
Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Analisis Pengaruh Wahhabisme terhadap Keterlibatan Arab Saudi dalam Kontestasi dengan Iran di Kawasan Tengah pada Peristiwa *Arab Spring* (2011-2016)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung,



Maulana Yusuf Hasan

ABSTRAK

Nama : Maulana Yusuf Hasan
Nomor Pokok : 6091801032
Judul : Analisis Pengaruh Wahhabisme terhadap Keterlibatan Arab Saudi dalam Kontestasi dengan Iran di Kawasan Timur Tengah pada Peristiwa *Arab Spring* (2011-2016)

Penulisan akademik ini ditujukan untuk meneliti bagaimana Wahhabisme mempengaruhi keterlibatan Arab Saudi dalam berkontestasi dengan Iran di kawasan Timur Tengah ketika peristiwa *Arab Spring* berlangsung. Wahhabisme yang berakar dari pemikiran Islamisme dan pergerakan Pan-Islamisme telah menitikberatkan persatuan dari aspek agama dan politik. Identitas Arab Saudi yang sangat lekat dengan nilai-nilai Wahhabisme telah membentuk perspektif Arab Saudi terhadap Iran, yang memiliki identitas yang bertolak-belakang dengan Arab Saudi. Dalam menganalisis penulisan akademik ini, penulis menggunakan teori konstruktivisme, khususnya konsep *Collective Identity* dan *Action*, untuk dapat menjelaskan tindak-tanduk Arab Saudi yang menganut identitas Wahhabi dalam melakukan kontestasi dengan Iran. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan suatu keterkaitan antara Wahhabisme dan Arab Saudi dalam segala aksi antagonistik yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Iran di kawasan Timur Tengah. Lalu, penulis juga menemukan suatu fakta bahwa aksi kontestasi yang dilakukan oleh keduanya telah mengalami peningkatan yang signifikan setelah terjadinya peristiwa *Arab Spring* pada tahun 2011, yang tentunya menjadi pokok pembahasan dalam penulisan akademik ini.

Kata Kunci: *Wahhabisme, Arab Saudi, Iran, kawasan Timur Tengah, Arab Spring.*

ABSTRACT

Name : Maulana Yusuf Hasan
Student ID : 6091801032
Title : Analysis of the Influence of Wahhabism on Saudi Arabia's
Involvement in the Contest with Iran in the Middle East
Region during the Arab Spring (2011-2016)

This academic writing is intended to examine how Wahhabism influenced Saudi Arabia's involvement in contesting with Iran in the Middle East region when the Arab Spring took place. Wahhabism, which is rooted in Islamic thought and the Pan-Islamism movement, has emphasized the unity of the religious and political aspects. The identity of Saudi Arabia which is very closely related to Wahhabism values has shaped Saudi Arabia's perspective on Iran, which has a different identity from Saudi Arabia. In analysing this academic writing, the author uses constructivism theory, especially the concept of Collective Identity and Action, to explain the behaviour of Saudi Arabia which adheres to Wahhabi identity in contesting with Iran. In conducting this research, the authors found a link between Wahhabism and Saudi Arabia in all the antagonistic actions carried out by Saudi Arabia against Iran in the Middle East region. Then, the author also finds a fact that the contestation actions carried out by the two have experienced a significant increase after the Arab Spring incident in 2011, which has become the main subject of discussion in this academic writing.

Keywords: *Wahhabism, Saudi Arabia, Iran, Middle East region, Arab Spring.*

KATA PENGANTAR

Penulisan akademik ini ditunjukkan untuk memenuhi syarat kelulusan program studi Sarjana Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan akademik ini mencakup pembahasan mengenai pengaruh yang diberikan oleh Wahhabisme terhadap keterlibatan Arab Saudi dalam berkontestasi dengan Iran di kawasan Timur Tengah, khususnya pada peristiwa Arab Spring, dalam kurun waktu 2011-2016. Penulisan akademik ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami pengaruh yang diberikan oleh fenomena Islamisme yang popularitasnya sedang meningkat di dunia internasional dengan menggunakan teori konstruktivisme. Selain itu, penulisan akademik ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para akademisi terkait dengan fenomena Islamisme dan pergerakan Pan-Islamisme, khususnya Wahhabisme, dalam mengkaji fenomena dan peristiwa yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan dunia internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penulisan akademik ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis selama menyusun penulisan akademik ini dan terutama selama menempuh pendidikan Sarjana Program Studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan. Pihak-pihak tersebut di antara lain:

1. Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan akademik ini.
2. Hasanuddin Arief dan Silvia Helmi Leiwakabessy, selaku orang tua penulis, yang telah membantu memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan akademik ini.
3. Zeno dari Citium, Epictetus, Lucius Annaeus Seneca, dan Marcus Aurelius, sebagai para filsuf Stoikisme, yang membentuk karakter dan pola pikir penulis.
4. Agnetta Navila Djumiril, selaku teman hidup penulis, yang selalu memprioritaskan penulis dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya.
5. dan teman-teman penulis, yakni Arshad Rafi Arfiansyah Amarindra, Hammam Agiko Althaf, Soeltan Mohammad Zoldi, serta teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis selama jenjang perkuliahan dalam ranah akademik dan non-akademik.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Pertanyaan Penelitian	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Kegunaan Penelitian.....	13
1.7 Kajian Literatur	14
1.8 Kerangka Pemikiran	21
1.9 Metodologi Penelitian	29
1.9.1 Metode Penelitian	29
1.9.2 Teknik Pengumpulan Data.....	29
1.10 Sistematika Pembahasan	30
BAB 2	32
2.1 Islamisme dan Pan-Islamisme: Identitas Wahhabisme di Arab Saudi	32
2.2 Islamisme dan Pan-Islamisme: Wahhabisme dan Pengaruh negara Barat dalam Proses ‘Wahhabisasi’ kawasan Timur Tengah.....	38
BAB 3	42
3.1 Revolusi Iran: Suatu Ancaman bagi Wahhabisme ?	42
3.2 Arab Saudi dalam Upaya <i>Counter-Revolution</i> pada Peristiwa <i>Arab Spring</i>	47

3.3 Kehadiran Iran sebagai Pihak Oposisi terhadap <i>Status-Quo</i> Kawasan Timur Tengah pada Peristiwa <i>Arab Spring</i>	54
3.4 Kontestasi Arab Saudi - Iran pada peristiwa <i>Arab Spring</i> dalam Babak Selanjutnya	57
BAB 4	70
4.1 Analisis terkait Pengaruh Identitas Wahhabi terhadap Perspektif Arab Saudi terkait dengan <i>Collective Identity</i> serta Antagonisme terhadap Iran	70
4.2 Analisis terkait Pengaruh Identitas Wahhabi terhadap Perspektif dan Aksi Arab Saudi dalam Ajang Kontestasi dengan Iran pada Peristiwa <i>Arab Spring</i>	81
BAB 5	103
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Negara Anggota <i>Gulf Cooperation Council</i>	56
Gambar 3.2 Kondisi Kawasan Timur Tengah pada peristiwa <i>Arab Spring</i>	62
Gambar 3.3 Peta negara sekutu Arab Saudi dan Iran serta medan kontestasi di kawasan Timur Tengah pada peristiwa <i>Arab Spring</i>	73

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peristiwa Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979 membuat hubungan antara kedua negara adidaya di kawasan Timur Tengah, yakni negara Arab Saudi dan Iran, menjadi tidak harmonis. Revolusi Iran sendiri merupakan gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan cendekiawan muslim yang dilangsungkan dalam skala nasional. Pada dasarnya, peristiwa Revolusi Iran didasari oleh suatu urgensi, yakni untuk mengimplementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan beragama dan berpolitik di Iran dengan cara menjatuhkan rezim monarki dinasti Pahlevi dan membentuk negara Republik Islam. Hal ini didukung oleh pemimpin gerakan revolusi tersebut, yakni Ayatullah Khomeini, yang juga merupakan seorang Imam Besar dan Cendekiawan Muslim Syiah.¹ Ayatullah Khomeini, atau yang kerap dikenal dengan sebutan Imam Khomeini, berpendapat bahwa gerakan revolusi yang dipimpin olehnya telah membentuk pemerintahan Islam yang sesuai dengan ajaran Islam dan turut menambahkan bahwa negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, adalah musuh bagi umat Islam itu sendiri.²

¹ Peter Edidin. *1979 Iranian Revolution*. New York Times Upfront. 2009.

² *Ibid.*

Sebagai negara yang seringkali disebut sebagai pelindung dari umat Islam di seluruh dunia, negara Arab Saudi tidak dapat berpangku tangan setelah melihat peristiwa Revolusi Iran terjadi.³ Pemerintah Arab Saudi berdalih bahwa peristiwa Revolusi Iran memberikan dampak yang begitu signifikan bagi *Status-Quo* di kawasan Timur Tengah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan negara Iran yang berusaha untuk mengeksport paham Revolusi Syiah, yang seringkali disebut sebagai Khomeinisme, agar dapat mengambil alih pengaruh Arab Saudi sebagai negara pelindung umat Islam di seluruh kawasan Timur Tengah, dan bahkan di seluruh dunia.⁴ Selain itu, Imam Khomeini juga menegaskan bahwa nilai-nilai Islam yang dianut oleh negara Arab Saudi sudah ‘melenceng’ dari ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Untuk membendung ekspor ideologi Revolusi Syiah dan melindungi pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, Arab Saudi membentuk suatu organisasi yang bernama *Gulf Cooperation Council (GCC)* yang terdiri dari negara-negara monarki lainnya di daerah Jazirah Arab pada tahun 1981.⁵ Tentunya, aksi yang dilakukan oleh Arab Saudi sebagai respon terhadap hasil dari peristiwa Revolusi Iran tersebut membuat hubungan antara kedua negara semakin tidak harmonis. Namun, puncak ketidakharmonisan antara negara Arab Saudi dan Iran dimulai ketika peristiwa *Arab Spring* dimulai pada tahun 2011.

³ Ahmad Moussalli. *Wahhabism, Salafism and Islamism: Who is the Enemy*. A Conflict Forum Monograph. 2009.

⁴ P. R. Kumaraswamy. *Who am I? The Identity Crisis in the Middle East*. Middle East Review of International Affairs 10, no. 1. 2006.

⁵ Vakil Sanam. *Iran and the GCC: Hedging, Pragmatism and Opportunism*. Research Paper, the Chatham House RIIS, the Middle East and North Africa Programme. 2018.

Peristiwa *Arab Spring* merupakan suatu peristiwa demonstrasi berskala besar yang dilangsungkan oleh rakyat sipil di seluruh kawasan Timur Tengah pada tahun 2011.⁶ Peristiwa ini sendiri memberikan dampak yang signifikan bagi negara-negara yang terletak di kawasan Timur Tengah. Peristiwa *Arab Spring* ini dilangsungkan secara kolektif dengan tujuan untuk menjatuhkan rezim yang otoriter dan anti-demokratis di kawasan Timur Tengah. Kemudian, rezim pemerintahan yang otoriter dan anti-demokrasi telah dianggap sebagai akar dari permasalahan sosial dan ekonomi, seperti adanya politik alienasi, angka kemiskinan dan tingkat korupsi yang tinggi, serta kebijakan ekonomi yang gagal.⁷

Aksi demonstrasi yang melanda seluruh kawasan Timur Tengah ini memicu efek destabilisasi kepada negara-negara yang berada di kawasan tersebut, dimana negara Libya, Suriah, dan Yaman merasakan dampak terburuk dari peristiwa ini, yakni ‘revolusi berdarah’.⁸ Revolusi berdarah tersebut ditunjukkan untuk menjatuhkan rezim pemerintahan negara setempat dengan menggunakan senjata dan perangkat militer lainnya. Kehadiran dari entitas politik dan militan bersenjata yang berideologi Islamisme ini mengukuhkan efek destabilisasi politik dalam peristiwa *Arab Spring*. Akan tetapi, kehadiran dari entitas politik dan militan bersenjata yang berideologi Islamisme tersebut semakin diterima oleh masyarakat kawasan Timur Tengah pada saat peristiwa *Arab Spring* terjadi.⁹ Perlu diketahui bahwa kehadiran dari entitas politik dan militan bersenjata yang berideologi

⁶ Mehran Kamrava. *The Arab Spring and the Saudi-Led Counterrevolution*. Orbis 56, no. 1. 2012.

⁷ El Hassane Aissa. *The Arab Spring: Causes, Consequences, and Implications*. Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College, 2012.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Islamisme semakin banyak bermunculan di kawasan Timur Tengah, terutama setelah peristiwa *Arab Spring* terjadi. Hal ini pun dimanfaatkan oleh negara Arab Saudi dan Iran untuk melindungi rezim pemerintahannya dan menyebarluaskan pengaruh negaranya masing-masing di kawasan Timur Tengah dalam waktu yang bersamaan. Kedua negara pun tersebut ikut andil dalam situasi anarki di kawasan tersebut dengan membantu entitas politik dan militan bersenjata yang memiliki aliran agama yang sama dengan masing-masing negara.

Perbedaan pandangan dalam ranah agama dan politik itulah yang menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memiliki nilai-nilai identitas yang berbeda antara satu sama lain. Sehingga, kepentingan dan kebijakan dari kedua negara pun saling bertabrakan karena telah menyinggung aspek agama dan politik yang tidak dapat dipisahkan dalam pemikiran Islamisme yang berbasis kepada nilai-nilai ajaran agama Islam.¹⁰ Perbedaan yang signifikan dari kedua negara tersebut lah menyebabkan kedua negara tersebut saling bersitegang, khususnya dalam peristiwa *Arab Spring*.

1.2 Identifikasi Masalah

Sejak meluasnya peristiwa *Arab Spring* di kawasan Timur Tengah pada tahun 2011, kontestasi yang terjadi antara negara Arab Saudi dan Iran telah memasuki babak baru yang tentunya turut menyebabkan peningkatan tensi dalam

¹⁰ James G. Mellon. *Pan-Arabism, Pan-Islamism and Inter-State Relations in the Arab World*. Nationalism and Ethnic Politics 8, no. 4. 2002. Hlm. 1-15.

aspek politik di kawasan tersebut. Perlu diketahui bahwa kondisi kawasan Timur Tengah sebelum peristiwa *Arab Spring* dapat terbilang cukup stabil ketimbang setelah peristiwa tersebut terjadi. Sehingga rivalitas antar kedua negara tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kawasan Timur Tengah itu sendiri. Namun, dengan adanya penyebaran aksi revolusi yang menyebabkan adanya peningkatan kondisi anarki di kawasan tersebut, Arab Saudi dan Iran pun memanfaatkan kondisi tersebut untuk saling memperkuat posisi dan kedudukannya masing-masing dalam kancah perpolitikan kawasan Timur Tengah. Tentunya, hal tersebut telah membuat negara-negara lainnya di kawasan tersebut menjadi turut terlibat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹¹

Perlu diketahui bahwa peristiwa *Arab Spring* dapat dikatakan sebagai peristiwa kunci, karena telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kontestasi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Iran. Pada periode tersebut, intensitas permusuhan antara Arab Saudi dan Iran mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dan bahkan dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Hal ini terjadi karena peristiwa *Arab Spring* telah ‘mengkalibrasi ulang’ tatanan politik di kawasan Timur Tengah. Dengan adanya hal tersebut, peristiwa *Arab Spring* sendiri telah memberikan kesempatan bagi Arab Saudi dan Iran untuk memperluas pengaruh negaranya masing-masing di saat kapabilitas negara-negara lainnya di kawasan Timur Tengah menurun secara signifikan.¹² Peran Arab Saudi

¹¹ F. Gregory Gause III. *Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War*. Brookings Doha Center Analysis Paper 11. 2014.

¹² Burhanettin Duran dan Nuh Yilmaz. *Islam, Models and the Middle East: The New Balance of Power following the Arab Spring*. *Perceptions: Journal of International Affairs* 18, no. 4. 2013. Hlm. 139-170.

dan Iran dalam ajang kontestasi pada masa peristiwa *Arab Spring* juga didorong oleh adanya paham agama yang dianut oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, dalam ajang perhelatan pada peristiwa *Arab Spring*, baik Arab Saudi maupun Iran, pun turut menggunakan identitas agama, yang mengalami kenaikan popularitas pada periode tersebut, untuk saling menguatkan pengaruh dari kedua negara tersebut dalam kancah perpolitikan di kawasan Timur Tengah yang telah ‘terkalibrasi ulang’.¹³

Bagi negara Arab Saudi, paham agama yang memiliki peran secara signifikan di negaranya, yakni Wahhabisme, memberikan motivasi bagi negaranya untuk terlibat dalam pergolakan politik di kawasan Timur Tengah ini. Wahhabisme sendiri seringkali disalah-artikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Makna dari Wahhabisme sendiri diambil nama belakang seorang cendekiawan Muslim di masa pergerakan Pan-Islamisme pada abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, yang memberikan makna bahwa Wahhabisme merupakan bentuk ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahhab.¹⁴

Pada dasarnya, ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut muncul pada masa pergerakan Pan-Islamisme, yang menitikberatkan persatuan umat Islam.¹⁵ Pokok ajaran yang disampaikan oleh beliau adalah bahwa ajaran Islam harus murni dan kembali pada ‘akarnya’, dimana hal ini disebut sebagai puritanisme yang

¹³ El Hassane Aissa. *The Arab Spring: Causes, Consequences, and Implications*. Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College, 2012.

¹⁴ P. R. Kumaraswamy. *Who am I? The Identity Crisis in the Middle East*. Middle East Review of International Affairs 10, no. 1. 2006.

¹⁵ Ahmad Moussalli. *Wahhabism, Salafism and Islamism: Who is the Enemy*. A Conflict Forum Monograph. 2009.

tentunya bersifat sangat tradisional.¹⁶ Selain itu, salah satu pokok ajaran dari paham tersebut adalah dengan diperkenalkannya konsep takfir, dimana konsep ajaran itu sendiri merupakan suatu konsep ajaran yang dapat mengucilkan atau ‘mengkafirkan’ umat Islam yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam yang ‘sesungguhnya’. Selain itu, Muhammad bin Abdul Wahhab juga melabeli para penganut agama Islam Syiah sebagai ‘orang-orang yang tidak percaya’ atau Kafir. Hal ini diperjelas oleh John McHugo, yang mengatakan bahwa pengikut ajaran paham Wahhabi seringkali mengelompokkan umat-umat Islam memiliki pemahaman yang berbeda dengan penganut paham Wahhabi itu sendiri. Walaupun, pada dasarnya para pengikut ajaran paham Wahhabi tidak ingin disebut dengan sebutan Wahhabi.¹⁷ Maka, dapat dikatakan bahwa paham Wahhabi turut berperan dalam mempengaruhi kontestasi antara Arab Saudi dan Iran, karena kedua belah negara memiliki paham agama yang cukup berbeda.

Selain itu, Wahhabisme juga telah memainkan peranan penting dalam politik domestik negara Arab Saudi. Hal ini dikarenakan pendiri dari negara Arab Saudi, yakni Abdulaziz bin Abdul Rahman al-Saud, merupakan penganut dari paham Wahhabi. Sehingga, ketika Abdulaziz bin Abdul Rahman al-Saud sedang mengukuhkan pondasi dari negara Arab Saudi, beliau memberikan peranan yang signifikan bagi para ulama Wahhabi dalam urusan bernegara, baik dalam aspek agama maupun politik. Hal ini dilakukan agar para ulama Wahhabi memberikan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ John McHugo. *A Concise History of Sunnis & Shi'is*. Georgetown University Press, 2017.

respon timbal balik yang positif, yakni menjamin otoritas dan legitimasi dari pemerintahan dinasti Saud di negara Arab Saudi.¹⁸

Seiring berjalannya waktu, negara Arab Saudi telah menjadi figur negara kuat yang disebut-sebut sebagai negara pelindung umat Islam di seluruh dunia.¹⁹ Hal ini juga didukung oleh ajaran paham Wahhabi yang turut disponsori oleh pemerintah Arab Saudi. Keberadaan dari paham Wahhabi telah membantu meningkat pamor negara Arab Saudi dalam aspek agama dan politik secara signifikan.²⁰ Hal tersebutlah yang mendorong Arab Saudi untuk semakin gencar dalam berkontestasi dengan Iran di kawasan regional Timur Tengah, karena Arab Saudi tidak ingin pamor negaranya turun, terutama setelah peristiwa Revolusi Iran terjadi. Dalam hal ini, paham Wahhabi telah membentuk cara pandang Arab Saudi terhadap Iran, khususnya pada saat peristiwa *Arab Spring*. Hal tersebut dapat dilihat ketika Arab Saudi memandang Iran sebagai suatu ancaman terhadap ‘kepemimpinan Islam Sunni’ yang selama ini dipegang oleh Arab Saudi.²¹ Peristiwa tersebut tentunya telah memperlihatkan adanya perbenturan identitas berupa ideologi agama dari kedua belah pihak, yang mana menurut pemahaman Islamisme, aspek agama dan politik tidak dapat dipisahkan.²²

¹⁸ David Commins. *The Wahhabi mission and Saudi Arabia*. Bloomsbury Publishing. 2005.

¹⁹ P. R. Kumaraswamy. *Who am I? The Identity Crisis in the Middle East*. Middle East Review of International Affairs 10, no. 1. 2006.

²⁰ David Commins. *The Wahhabi mission and Saudi Arabia*. Bloomsbury Publishing. 2005.

²¹ Burhanettin Duran dan Nuh Yilmaz. *Islam, Models and the Middle East: The New Balance of Power following the Arab Spring*. Perceptions: Journal of International Affairs 18, no. 4. 2013. Hlm. 139-170.

²² P. R. Kumaraswamy. *Who am I? The Identity Crisis in the Middle East*. Middle East Review of International Affairs 10, no. 1. 2006.

Apabila ditelaah lebih lanjut, kebijakan yang dilangsungkan oleh Arab Saudi dan Iran dalam ruang lingkup kawasan Timur Tengah sejak peristiwa *Arab Spring* didasari oleh aspek identitas dalam ranah agama, yakni antara pihak Sunni dan Syiah, khususnya antara ideologi Wahhabisme dan Khomeinisme. Perlu dipahami pula bahwa identitas berupa paham atau ideologi, seperti Wahhabisme yang dianut oleh Arab Saudi, membantu mengkonstruksi pandangan suatu negara terhadap negara lain, dalam kasus ini adalah Arab Saudi terhadap Iran.²³ Kemudian, paham Wahhabi yang dianut Arab Saudi pun turut memainkan peran dalam kontestasi ini, karena paham Wahhabi seringkali mengelompokkan umat-umat Islam memiliki pemahaman yang berbeda dengan penganut paham Wahhabi itu sendiri, dan bahkan melabeli golongan tersebut dengan sebutan 'Kafir'.²⁴ Seiring dengan berjalannya peristiwa *Arab Spring*, negara Arab Saudi menggunakan identitas Islam Sunni dalam menghimpun 'negara-negara Islam Sunni' lainnya untuk bertindak secara kolektif dan sebagai bentuk 'solidaritas' untuk melawan pengaruh Iran. Tentunya, basis utama dari keterlibatan dari Arab Saudi dalam ajang kontestasi dengan Iran di kawasan Timur Tengah pasca peristiwa *Arab Spring* disebabkan oleh dorongan yang diberikan oleh aspek identitas, dalam kasus ini paham Wahhabi, yang dianut oleh Arab Saudi itu sendiri.

²³ Ahmad Moussalli. *Wahhabism, Salafism and Islamism: Who is the Enemy*. A Conflict Forum Monograph. 2009.

²⁴ John McHugo. *A Concise History of Sunnis & Shi'is*. Georgetown University Press, 2017.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan pada pengaruh yang diberikan oleh Wahhabisme terhadap keterlibatan Arab Saudi dalam kontestasinya dengan Iran di kawasan Timur Tengah pada masa peristiwa *Arab Spring* di tahun 2011. Kontestasi Arab Saudi dengan Iran yang dipengaruhi oleh Wahhabisme ini didasari oleh pergerakan Pan-Islamisme yang menitikberatkan persatuan umat Islam, yang tentunya juga menarik partisipasi dari negara-negara Timur Tengah dalam keberlangsungan kontestasi tersebut. Lalu, penulis melihat bahwa ideologi dan pemahaman agama yang dianut oleh negara terkait, khususnya Arab Saudi, membentuk suatu identitas yang unik bagi masing-masing negara. Sehingga penulis mengkaji aspek identitas berupa ideologi yang berbasis kepada ajaran agama dalam kontestasi politik tersebut dengan pendekatan teori konstruktivisme, serta konsep *Collective Identity* dan *Collective Action*. Untuk memperkuat validitas dari pemaparan data yang objektif mengenai peristiwa *Arab Spring* itu sendiri, penulis menampilkan data dari tahun 2011 sampai dengan 2016.

Penulis sendiri telah memfokuskan linimasa penelitian dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Alasan mengapa penulis memfokuskan penelitian ini dari tahun 2011 adalah karena negara Arab Saudi mulai terlibat dalam peristiwa *Arab Spring* pada tahun tersebut. Hal ini dapat dilihat dari intervensi negara Arab Saudi dan organisasi *Gulf Cooperation Council* dalam aksi demonstrasi di Bahrain pada tanggal 14 Maret 2011.²⁵ Intervensi tersebut dilakukan karena rezim monarki

²⁵ Dilip Hiro. *Cold War in the Islamic World: Saudi Arabia, Iran and the struggle for supremacy*. Oxford University Press. 2019.

negara Bahrain tidak dapat memitigasi aksi demonstrasi, yang dilangsungkan oleh masyarakat Muslim Syiah di negaranya sendiri. Intervensi negara Arab Saudi dan organisasi GCC tersebut merupakan awal dari keterlibatan Arab Saudi dalam peristiwa *Arab Spring* yang dilakukan untuk menghalangi pengaruh penyebaran ideologi Syiah yang berusaha untuk disebar oleh Iran. Tentunya, aksi intervensi tersebut pun juga didorong oleh paham Wahhabi itu sendiri.²⁶

Selain itu, alasan mengapa penulis menetapkan tahun 2016 sebagai batasan akhir dari penelitian ini karena pengaruh yang diberikan oleh paham Wahhabi terhadap Arab Saudi mengalami penurunan yang signifikan sejak putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammad bin Salman, memegang peranan penting dalam terbentuknya kebijakan dalam dan luar negeri Arab Saudi yang semakin progresif dan liberal pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya kerangka strategis yang bernama **Vision 2030**, yang akan mentransformasi aspek ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya di Arab Saudi, serta mengalihkan fokus ekonomi Arab Saudi dari bisnis ekstraksi menjadi bisnis turisme yang berkelanjutan.²⁷ Untuk menjalankan Vision 2030 tanpa hambatan dari pihak-pihak lainnya, Mohammad bin Salman telah melakukan aksi penangkapan massal terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu ‘kestabilan’ negara Arab Saudi sekaligus untuk mengkonsolidasi kekuatan serta pengaruhnya, yang dapat dilihat dari penangkapan

²⁶ Burhanettin Duran dan Nuh Yilmaz. *Islam, Models and the Middle East: The New Balance of Power following the Arab Spring*. Perceptions: Journal of International Affairs 18, no. 4. 2013. Hlm. 139-170.

²⁷ Rosie Bsheer. *How Mohammed Bin Salman Has Transformed Saudi Arabia*. The Nation. 21 Mei 2018. <https://www.thenation.com/article/archive/how-mohammed-bin-salman-has-transformed-saudi-arabia>.

beberapa anggota keluarga Saud dan para ulama Wahabi yang menentang kebijakan beliau. Hal tersebut diikuti dengan adanya perombakan anggota dewan keagamaan, meningkatnya peran ulama ‘moderat’, dan menurunnya peran ulama Wahhabi di negara Arab Saudi pada akhir tahun 2016.²⁸ Maka dapat dikatakan bahwa sejak peristiwa tersebut, ulama dan paham Wahhabi tidak lagi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berjalannya kontestasi antara Arab Saudi dan Iran di kawasan Timur Tengah.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan sebuah pertanyaan penelitian yang didasari oleh permasalahan yang sudah penulis paparkan sebelumnya. Pertanyaan penelitian tersebut adalah **Bagaimana Wahhabisme mempengaruhi keterlibatan Arab Saudi dalam kontestasinya dengan Iran di kawasan Timur Tengah pada Peristiwa Arab Spring dalam kurun waktu 2011-2016?**

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditunjukkan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai pengaruh yang diberikan oleh nilai-nilai Islamisme dan

²⁸ *Saudi Arabia Names New Labor Minister, Reshuffles Religious and Shura Councils*. Reuters. 2 Desember 2016. Diakses pada tanggal 9 Maret 2022. <https://www.reuters.com/article/us-saudi-politics/saudi-arabia-names-new-labor-minister-reshuffles-religious-and-shura-councils-idUSKBN13R2HE>.

Wahhabi terhadap kontestasi yang dilakoni oleh Arab Saudi di kawasan Timur Tengah pasca peristiwa *Arab Spring*. Perlu dipahami bahwa aspek agama berupa Wahhabisme tidak dapat dipisahkan dengan aspek politik negara Arab Saudi. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana paham Wahhabi membentuk perspektif Arab Saudi terhadap Iran pada saat peristiwa *Arab Spring* berlangsung. Kemudian, penulis juga memaparkan perihal identitas negara Arab Saudi, khususnya terkait konsep Islamisme, Pan-Islamisme, dan Wahhabisme, sebagai suatu perspektif dalam memahami tindakan Arab Saudi untuk terlibat dalam kontestasi di kawasan Timur Tengah ini. Lalu, penelitian ini juga ditujukan untuk menunjukkan keabsahan ungkapan *Anarchy is What States Makes of It* yang didasari oleh terkonstruksi-sosialnya dunia internasional oleh aspek identitas yang dipaparkan dalam teori konstruktivisme.

1.6 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian akademik ini adalah untuk dapat memaparkan bagaimana nilai identitas Wahhabi dapat mempengaruhi keterlibatan Arab Saudi ketika berkontestasi dengan Iran di kawasan Timur Tengah pada peristiwa *Arab Spring* (2011-2016). Penelitian akademik ini pun diharapkan dapat menjadi acuan bagi para akademisi lainnya yang memiliki ketertarikan dengan topik sejenis di kemudian hari.

1.7 Kajian Literatur

Dalam mengkaji penelitian ini, jurnal yang berjudul *Political Change in the Middle East: An Attempt to Analyze the "Arab Spring"* yang ditulis oleh **Martin Beck dan Simone Hüser**, dapat menjadi literatur yang mampu menjelaskan mengenai peristiwa *Arab Spring* itu sendiri. Literatur ini pada dasarnya membahas tentang bagaimana peristiwa *Arab Spring* meluas di kawasan Timur Tengah. Selain itu, literatur ini juga membahas mengenai perubahan rezim politik dalam skala besar di kawasan tersebut.²⁹ Negara-negara di kawasan Timur Tengah tentunya kewalahan dalam menghadapi peristiwa demonstrasi ini. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Tunisia, merupakan contoh negara yang dapat menangani arus demonstrasi tersebut di negaranya masing-masing. Namun, negara-negara seperti, Mesir dan Suriah, mengalami kegagalan dalam membendung arus demonstrasi di negaranya masing-masing. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan negara-negara tersebut untuk memenuhi tuntutan masyarakat sipil untuk bergeser ke arah yang lebih demokratis. Hal ini dapat dilihat dari negara Mesir yang membentuk pemerintah junta militer dan negara Suriah yang merespon gerakan oposisi di negaranya dengan menggunakan instrumen militer, sehingga menyebabkan pecahnya perang sipil yang belum kunjung usai hingga saat ini.

Pada dasarnya, penulis setuju dengan pemaparan Beck dan Hüser, karena telah menggambarkan bahwa peristiwa *Arab Spring* memberikan dampak yang

²⁹ Martin Beck dan Simone Hüser. 2012. *Political Change in the Middle East: An Attempt to Analyze the 'Arab Spring'*. GIGA Working Papers, No. 203. German Institute of Global and Area Studies (GIGA), Hamburg.

begitu signifikan terhadap *Status-Quo* dari kawasan Timur Tengah, terutama bagi aspek politiknya.³⁰ Kondisi anarki yang dapat dilihat di kawasan Timur Tengah pasca peristiwa *Arab Spring* ini benar-benar merombak struktur pemerintahan di negara-negara setempat. Peristiwa *Arab Spring* juga menyebabkan entitas politik yang baru mulai bermunculan dalam panggung politik kawasan Timur Tengah, seperti entitas politik yang berideologi Islamisme. Walaupun dalam literatur ini signifikansi dari identitas Islamis sudah sempat dibahas, namun pembahasan mengenai hal tersebut belum terlihat cukup menyeluruh, khususnya terkait dengan identitas Wahhabi yang dianut oleh Arab Saudi pada masa peristiwa *Arab Spring*. Tentunya, hal tersebut akan dibahas pada bab-bab selanjutnya dalam penulisan skripsi penulis.

Lalu, buku yang dikarang oleh **David Commins**, yakni *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*, juga merupakan buku yang digunakan sebagai kajian literatur dalam penulisan skripsi ini. *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia* sendiri memberikan penjelasan bagaimana paham Wahhabi memberikan dampak kepada kepemimpinan dinasti Saud di negara Arab Saudi. Tentunya, Commins memberikan penjelasan bagaimana suatu pemahaman agama berupa paham Wahhabi mampu mempengaruhi terbentuknya kebijakan politik suatu negara, dalam kasus ini yaitu negara Arab Saudi.³¹

Setelah mendirikan negara Arab Saudi yang berbasis monarki, Abdulaziz bin Abdul Rahman al-Saud menjadikan paham Wahhabi sebagai paham agama

³⁰ *Ibid.*

³¹ David Commins. *The Wahhabi mission and Saudi Arabia*. Bloomsbury Publishing. 2005.

yang memiliki peran yang dominan di negara Arab Saudi. Dengan kata lain, konstitusi negara Arab Saudi berbasis kepada nilai-nilai agama yang terdapat dalam ajaran paham Wahhabi. Sejak berdirinya negara Arab Saudi, para pemuka ulama Wahhabi turut mengokohkan pondasi negara Arab Saudi itu sendiri dengan dalih bahwa negara tersebut merupakan pelindung bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tentunya para ulama dan pemimpin negara Arab Saudi menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh melekatnya aspek agama dan politik di dalam konstitusi negara Arab Saudi itu sendiri. Sebagai negara yang memiliki kapabilitas yang secara keseluruhan sangat tinggi di antara negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya, paham Wahhabi yang dianut oleh Arab Saudi mulai menyebar ke seluruh pelosok kawasan tersebut, dan bahkan hingga ke seluruh dunia.³²

Penulis memiliki pandangan yang sama terhadap pandangan yang diberikan oleh Commins, karena Commins melihat bahwa paham Wahhabi memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara Arab Saudi. Tentunya, hal ini dapat dilihat dari konstitusi negara Arab Saudi itu sendiri yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam. Posisi Arab Saudi sebagai ‘negara pelindung’ umat Islam pun semakin kokoh seiring dengan menguatnya Wahhabisme itu sendiri. Tentunya, hal ini membuat Arab Saudi semakin tergerak untuk untuk mendorong popularitas dari Wahhabisme sebagai identitas yang digadang-gadang dapat mempersatukan masyarakat Islam Sunni di kawasan Timur Tengah. Namun, pembahasan dalam literatur ini tidak mencakup pembahasan mengenai peristiwa *Arab Spring*, yang

³² *Ibid.*

menunjukkan implementasi dari nilai-nilai Wahhabi yang dianut oleh Arab Saudi dalam peristiwa tersebut, khususnya terhadap Iran yang dipersepsikan sebagai ancaman. Untuk itu, penulis membahas mengenai pengaruh yang diberikan oleh paham Wahhabi terhadap tindakan dan perilaku Arab Saudi pada peristiwa *Arab Spring* dalam penulisan skripsi ini.

Kemudian, artikel berupa jurnal yang berjudul *Who Am I?: The Identity Crisis In The Middle East* yang ditulis oleh **Kumaraswamy** menjelaskan ‘kentalnya’ nilai-nilai identitas pada elemen masyarakat di kawasan Timur Tengah.³³ Menurut Kumaraswamy, kawasan Timur Tengah itu sendiri merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman bahasa dan budaya. Keanekaragaman dalam segi identitas yang dimiliki oleh masyarakat di kawasan Timur Tengah pun juga tercermin dalam aspek politik dan ideologi yang dianut oleh masing-masing negara yang berada di dalam kawasan itu sendiri. Keanekaragaman identitas yang dimiliki oleh masyarakat di kawasan tersebut semakin marak bermunculan dan diperjuangkan oleh seluruh aktor sejak awal abad ke-20. Sehingga, hal ini menimbulkan kondisi yang disebut sebagai krisis identitas di kawasan tersebut.

Dalam kawasan Timur Tengah, identitas agama merupakan salah satu identitas yang cukup ‘kental’ dalam lingkungan masyarakat setempat.³⁴ Hal ini dapat dilihat melalui ideologi Islamisme yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Perlu diingat bahwa nilai-nilai dari ajaran agama Islam sangat

³³ P. R. Kumaraswamy. *Who am I? The Identity Crisis in the Middle East*. Middle East Review of International Affairs 10, no. 1. 2006.

³⁴ *Ibid.*

mempengaruhi lingkungan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh implementasi dari ideologi Islamisme yang tidak dapat memisahkan aspek politik dan agama. Selain itu, identitas transnasional juga membentuk identitas dari masyarakat yang berada di kawasan Timur Tengah pada saat ini.³⁵ Hal ini dapat dilihat dari menguatnya pergerakan Pan-Islamisme pada pertengahan abad ke-20. Namun, gerakan Pan-Islamisme, yang pada dasarnya menyerukan persatuan *Ummah*, telah menyebabkan perdebatan dan bahkan pertingkaian yang disebabkan oleh perbedaan dari berbagai pandangan yang lahir dari pergerakan tersebut. Tentunya, hal ini menyebabkan perpecahan antara umat Islam sangat mudah untuk terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kumaraswamy menunjukkan bahwa aspek identitas memberikan dampak yang begitu besar bagi kawasan yang dianggap ‘turbulen’ tersebut. Hal ini pun sesuai dengan pemaparan penulis terkait dengan faktor identitas dalam melihat kawasan Timur Tengah, khususnya pada masa peristiwa *Arab Spring*. Menurut Kumaraswamy, berbagai jenis identitas yang hadir di kawasan Timur Tengah membuat tensi politik pun tidak dapat untuk dihindari. Perbedaan identitas dalam segi etnis, ideologi politik, dan agama sekalipun dapat menyebabkan suatu tensi politik yang tentunya membahayakan bagi rezim politik negara terkait. Hal ini dapat dilihat ketika para pemangku kekuasaan di kawasan Timur Tengah turut terjerumus ke dalam suatu pergolakan politik yang disebabkan oleh perbedaan identitas antara masing-masing pihak yang bertikai. Namun, dalam literatur ini, Kumaraswamy belum menjelaskan mengenai meningkatnya

³⁵ *Ibid.*

popularitas identitas Islamis dan perpecahannya, khususnya di antara Arab Saudi dan Iran dalam peristiwa *Arab Spring* yang diakibatkan oleh identitas Wahhabi yang dianut oleh Arab Saudi. Itu sebabnya, penulis membahas mengenai hal tersebut dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, buku yang berjudul *Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War* yang dikarang oleh **F. Gregory Gause III** menjadi salah satu acuan kajian literatur yang selanjutnya. Dalam buku tersebut, Gause menjelaskan terkait situasi perang dingin di kawasan Timur Tengah yang ‘dibumbui’ dengan konflik sektarianisme.³⁶ Gause menjelaskan bahwa peristiwa *Arab Spring* memberikan efek yang buruk terhadap kestabilan politik di kawasan Timur Tengah. Gause turut menjelaskan bahwa konflik sektarianisme semakin marak dilakukan ketika peristiwa *Arab Spring* terjadi, yang tentunya disebabkan oleh antagonisme dan persaingan antara Arab Saudi dan Iran di kawasan Timur Tengah. Kedua negara adidaya di kawasan Timur Tengah tersebut telah memantik isu agama dalam urusan berpolitik, sehingga perpecahan antara masyarakat kawasan Timur Tengah semakin ‘menjadi-jadi’. Tentunya, hal ini membentuk kubu-kubu politik yang memperkeruh hubungan antara penganut aliran Sunni dan Syiah yang dahulu berada dalam kondisi yang damai dan saling hidup berdampingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gause tersebut sesuai dengan arahan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena telah memberikan pemaparan bahwa identitas agama sangat ‘kental’ di kawasan Timur Tengah dan

³⁶ F. Gregory Gause III. *Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War*. Brookings Doha Center Analysis Paper 11. 2014.

identitas agama telah dipersenjatai sebagai ‘bahan bakar’ dalam konflik sektarianisme di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan oleh agenda politik Arab Saudi dan Iran yang bersandar kepada ajaran nilai-nilai agama Islam serta paham-paham yang dianut oleh masing-masing negara. Karena kedua negara tersebut memiliki pemahaman agama yang berbeda, konflik sektarianisme yang menjadi bagian dari perang proksi itu sendiri semakin marak terjadi, terutama pada masa peristiwa *Arab Spring*. Namun, penjelasan dalam literatur ini tidak menitikberatkan signifikansi dan pengaruh yang diberikan dari nilai-nilai identitas yang dimiliki oleh Arab Saudi dan Iran secara utuh. Untuk itu, penulis membahas mengenai signifikansi dari nilai-nilai identitas dari kedua belah pihak, khususnya identitas Wahhabi yang tidak utamakan dalam literatur tersebut, dalam membahas kontestasi politik di kawasan Timur Tengah pada peristiwa *Arab Spring*.

Apabila ditelaah lebih lanjut, literatur-literatur yang sudah disebutkan sebelumnya sudah memperlihatkan keberadaan identitas agama dalam kancah perpolitikan dalam kawasan Timur Tengah. Namun, literatur-literatur tersebut belum banyak membahas tentang pengaruh paham Wahhabi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam ajang kontestasi antara Arab Saudi dan Iran di kawasan Timur Tengah, khususnya pada peristiwa *Arab Spring*. Oleh karena itu, penulis memfokuskan pembahasan terhadap kontestasi yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran, yang memanfaatkan kondisi anarki pada peristiwa *Arab Spring* serta identitas kolektif yang dimiliki oleh *Ummah* di kawasan Timur Tengah secara lebih lanjut dengan pendekatan nilai-nilai identitas. Selain itu, untuk melengkapi pembahasan yang telah dibahas dalam literatur-literatur sebelumnya, penulis juga

membahas tentang ajang kontestasi di kawasan Timur Tengah dengan memperlihatkan pengaruh yang diberikan oleh Wahhabisme dan nilai-nilai Islamisme sebagai identitas yang mendorong keterlibatan Arab Saudi dalam ajang kontestasi tersebut.

1.8 Kerangka Pemikiran

Dalam mengkaji kontestasi di kawasan Timur Tengah yang dilangsungkan oleh Arab Saudi dalam rangka membendung pengaruh Iran, landasan pemahaman berupa **teori konstruktivisme** merupakan pemahaman yang dapat memahami situasi tersebut. Teori konstruktivisme sendiri merupakan teori yang digagas oleh Alexander Wendt dalam buku yang berjudul *Anarchy is What States Makes of It: The Social Construction of Power Politics*.³⁷ Secara fundamental, teori konstruktivisme yang dipaparkan oleh Wendt ini pada dasarnya mengakui bahwa sistem dunia internasional pada saat ini bersifat anarkis.³⁸ Namun, menurut teori konstruktivisme, ‘keanarkisan’ dari sistem internasional tidak terbentuk secara kodrati dan mutlak, melainkan dengan respon atau tindakan yang diberikan oleh aktor berupa negara dalam sistem internasional itu sendiri. Wendt sendiri berargumen bahwa anarki di sistem internasional diproduksi dan dilanggengkan oleh kebijakan yang diimplementasikan oleh suatu aktor berupa negara. Selain itu,

³⁷ Alexander Wendt. *Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*. International Organization 46, no. 2. 1992. Hlm. 391-425.

³⁸ Richard Jackson, Georg Sørensen, dan Jørgen Møller. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. USA: Oxford University Press. 2019.

teori konstruktivisme itu sendiri memiliki landasan bahwa sistem internasional merupakan sistem yang terkonstruksi secara sosial dan para aktor berupa negara turut memainkan peran dalam didalamnya. Hal ini dikarenakan Wendt menganggap bahwa aktor berupa negara merupakan aktor penting yang menjadi unit analisis utama dalam politik internasional.³⁹

Negara-negara dalam sistem internasional yang terkonstruksi secara sosial tersebut memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam memahami konfigurasi politik internasional sesuai dengan identitas yang dianut oleh masing-masing negara. Menurut Wendt, **identitas sendiri merupakan suatu properti yang dimiliki oleh suatu aktor tertentu yang menggerakkan sikap, perilaku, dan motivasi berdasarkan pemahaman yang dianut oleh masing-masing aktor.**⁴⁰ Tentunya, sebagai *Agent of Change*, aktor berupa negara mampu memberikan perubahan dalam sistem internasional yang didasari oleh kebijakan yang diterapkannya. Kebijakan yang didasari oleh kepentingan suatu negara pada dasarnya terbentuk atas nilai-nilai identitas dan struktur sosial yang terdapat dalam level domestik maupun internasional.

Menurut Wendt, kerelatifan dari perspektif mengenai sistem internasional itu sendiri yang membuat aktor berupa negara dapat mengidentifikasi entitas politik lainnya manakah yang dapat dijadikan sebagai ‘kawan’ atau ‘lawan’.⁴¹ Hal yang menjadikan suatu negara menjadi ‘kawan’ atau ‘lawan’ bagi negara lainnya

³⁹ Alexander Wendt. *Collective Identity Formation and the International State*. American Political Science review 88, no. 2. 1994. Hlm. 384-396.

⁴⁰ Richard Jackson, Georg Sørensen, dan Jørgen Møller. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. USA: Oxford University Press. 2019.

⁴¹ *Ibid.*

adalah persamaan dan/atau perbedaan identitas antara satu sama lain dengan melalui proses *Recognition*.⁴² Melalui proses tersebut, konfigurasi politik dalam dunia internasional tidak berasal dari konfigurasi *Power* yang bersifat materialis, namun dapat dilihat bahwa aktor berupa negara di dunia internasional cenderung merasa aman dengan negara lainnya yang memiliki ideologi (identitas) yang sama ketimbang ideologi yang berbeda, dengan kata lain secara idealis.

Wendt menambahkan bahwa terdapat suatu bentuk kalkulasi dalam menganalisis implementasi kebijakan negara yang didasari atas nilai rasionalitas, yakni *Desire + Belief = Action*.⁴³ *Desire* merupakan kepentingan negara, sedangkan *Belief* merupakan identitas tertentu yang dianut oleh negara. Tanpa adanya kepentingan, maka identitas tidak dapat digerakkan atau dimanifestasikan sebagai suatu motivasi dalam penerapan kebijakan. Lalu, tanpa adanya identitas, maka implementasi dari kepentingan negara menjadi tidak terarah. Dapat dikatakan bahwa kepentingan dan identitas bersinergis dalam merumuskan suatu aksi atau implementasi dari kebijakan negara itu sendiri.

Wendt menjelaskan bahwa terdapat empat jenis identitas, yakni *Personal, Type, Role, dan Collective Identity*.⁴⁴ *Personal Identity* adalah suatu jenis identitas yang dimiliki oleh aktor berupa individu atau kelompok yang independen secara homeostatis yang membedakan dirinya dengan aktor lainnya. *Type Identity* adalah

⁴² Alexander Wendt. *Collective Identity Formation and the International State*. American Political Science review 88, no. 2. 1994. Hlm. 384-396.

⁴³ Alexander Wendt. *Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*. International Organization 46, no. 2. 1992. Hlm. 391-425.

⁴⁴ Alexander Wendt. *Social theory of international politics*. Cambridge University Press, Vol. 67. 1999.

suatu jenis identitas yang mengkategorikan atau melabeli suatu aktor yang memiliki satu atau lebih kesamaan karakteristik, yang meliputi kesamaan dalam penampilan, sifat, nilai moral, pengetahuan, pengalaman, budaya, bahasa, dan historis. *Role Identity* merupakan suatu jenis identitas yang bergantung terhadap suatu aktor lain. Jenis identitas ini akan terlihat ketika terdapat situasi sosial yang membuat suatu aktor turut berperan di dalamnya. Berbeda halnya dengan *Type Identity*, *Role Identity* bukanlah jenis identitas yang didasari oleh atribut intrinsik, yakni atribut identitas yang dimiliki oleh suatu aktor tanpa adanya pengaruh dari lingkungan sosial (independen).

Jenis identitas yang terakhir, yakni *Collective Identity*, merupakan jenis identitas yang dibangun atas dasar relasi antara antar aktor yang memiliki suatu persamaan yang dapat dijadikan suatu hal yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan.⁴⁵ *Collective Identity* sendiri merupakan gabungan dari *Personal*, *Type*, dan *Role Identity*. Hal ini dikarenakan sebelum membentuk *Collective Identity*, suatu aktor yang memiliki *Personal Identity*, akan mengidentifikasi dirinya sendiri (*Self*) dan aktor lainnya (*Others*) melalui proses yang disebut sebagai *Struggle for Recognition*. *Collective Identity* dalam dunia internasional menitikberatkan tingkat homogenitas suatu aktor, berupa negara, dalam aspek identitas dan hal tersebut menjadi basis bagi negara-negara terkait dalam mengeluarkan suatu aksi atau kebijakan.⁴⁶ Maka, terbentuknya *Collective Identity*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

didasari oleh adanya kesamaan identitas dan juga kepentingan (*Interest*), seperti *Political Survival, Autonomy, Economic Well-Being, dan Collective Self-Esteem*.⁴⁷

Collective Identity juga menjelaskan terkait hubungan antara negara yang satu dengan yang lainnya dengan pendekatan identitas. Suatu negara cenderung akan melakukan tindakan yang kooperatif dengan yang lainnya apabila terdapat suatu kesamaan identitas dan kepentingan.⁴⁸ Kesamaan identitas dan kepentingan yang dimaksud adalah tingginya tingkat homogenitas, yang dapat meliputi segi historis, politik, ekonomi, budaya, agama, dan suku, serta perspektif. Tentunya, perbedaan mencolok yang dimiliki oleh negara lain membuat negara-negara yang memiliki identitas yang sama semakin dekat antara satu sama lain.

Dalam interaksi tingkat regional dan internasional, peran *Collective Identity* dapat memperkuat basis kerjasama yang kooperatif antara negara-negara yang berada dalam suatu kawasan dan bahkan di seluruh belahan dunia.⁴⁹ Menurut Wendt, negara-negara yang memiliki identitas yang sama cenderung akan melakukan tindakan kolektif, yang tentunya menguntungkan negara-negara tersebut. Maka, Wendt memperkenalkan suatu konsep yang disebut sebagai *Collective Action*, atau aksi kolektif, yang didasari oleh *Collective Interest*.

⁴⁷ Alexander Wendt. *Collective Identity Formation and the International State*. American Political Science review 88, no. 2. 1994. Hlm. 384-396.

⁴⁸ Alexander Wendt. *Social theory of international politics*. Cambridge University Press, Vol. 67. 1999.

⁴⁹ *Ibid.*

Terbentuknya *Collective Identity* dan *Action* tentunya juga didasari oleh faktor domestik dan sistemik (*Domestic and Systemic Determinants*).⁵⁰

Domestic Determinants sendiri berisikan tiga hal yang menentukan terbentuknya *Collective Identity* antar negara, yakni kepentingan pribadi, hubungan antara *State-Society*, dan identitas nasional yang menyatukan berbagai identitas.⁵¹ Selain itu terdapat pula *Systemic Determinants* yang menjelaskan bahwa interaksi sosial, yang didasari oleh kebutuhan dan kepentingan, dapat membentuk *Collective Identity* dalam sistem regional dan internasional. Dengan terbentuknya *Collective Identity*, aktor berupa negara akan melihat aktor negara lainnya sebagai *Extension* bagi dirinya sendiri. Tentunya, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat kecenderungan bagi aktor negara tersebut untuk mensegregasikan negara-negara lainnya yang memiliki identitas berbeda dan melabelinya sebagai suatu *Anathema*.⁵² Hal ini disebabkan karena *Collective Action* dapat ditujukan kepada suatu peristiwa dan/atau aktor tertentu, yang suatu saat akan saling bersinggungan. Mengingat bahwa terdapat beraneka ragam jenis identitas, serta kebutuhan dan kepentingan di dunia internasional.

Apabila ditelaah secara lebih lanjut, ideologi merupakan salah satu bagian dari identitas suatu negara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa sistem internasional terkonstruksi secara sosial dan terbentuk atas interaksi antar negara. Sehingga, interaksi antar negara dalam dunia internasional dan bahkan

⁵⁰ Alexander Wendt. *Collective Identity Formation and the International State*. American Political Science review 88, no. 2. 1994. Hlm. 384-396.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

dalam suatu kawasan dipengaruhi oleh ideologi dan nilai-nilai tertentu yang dianut oleh masing-masing negara.⁵³ Selain ideologi, Wendt berargumen bahwa kebijakan luar negeri yang diadopsi oleh negara-negara di dunia internasional dipengaruhi oleh karakteristik suatu negara yang dapat terdiri dari aspek geografis, etnis, budaya, dan agama. Aspek-aspek tersebut lah yang membentuk realitas atau perspektif dari suatu negara yang beraneka ragam dalam menjalankan interaksi di dunia internasional itu sendiri.

Alasan utama penulis menggunakan konsep *Collective Identity* dan *Collective Action* dalam pembahasan ini adalah karena kontestasi yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran telah dipengaruhi dan turut melibatkan unsur-unsur agama, yang telah menjadi **identitas domestik utama** bagi kedua negara. Berdasarkan pemikiran Islamisme yang dianut oleh kedua negara, aspek agama dan politik tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan politiknya, kedua negara tersebut turut menyertakan nilai-nilai agama di dalamnya.⁵⁴ Lalu, pergerakan Pan-Islamisme yang melahirkan aliran Wahhabi pada dasarnya menitikberatkan kepada persatuan umat Islam yang bersifat kolektif. Tentunya, hal ini dapat dilihat ketika paham Wahhabisme dan Khomeinisme, yang masing-masing dianut dan didengungkan oleh Arab Saudi dan Iran, menitikberatkan aksi kolektif, berupa persatuan *Ummah* (umat Islam). Dalam proses menyatukan *Ummah*, Arab Saudi dan Iran pun juga menggunakan

⁵³ Alexander Wendt. *Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*. International Organization 46, no. 2. 1992. Hlm. 391-425.

⁵⁴ Bassam Tibi. *Islamism and Islam*. Yale University Press, 2012.

pemahaman agama yang dianutnya sebagai media untuk menguatkan pengaruh negaranya masing-masing.

Penggunaan konsep *Collective Identity* dan *Collective Action* pun juga dinilai sesuai dengan meningkatnya identitas Islamisme, khususnya pada peristiwa *Arab Spring*. Dengan meningkatnya identitas Islami pada peristiwa *Arab Spring*, perpecahan antara kelompok Sunni dan Syiah semakin ‘menjadi-jadi’, terutama ketika Arab Saudi dan Iran berkontestasi dengan memanfaatkan identitas agama melalui proses *Struggle for Recognition*. Dengan didegungkannya identitas agama yang bersifat kolektif dalam ajang kontestasi ini, penulis menggunakan berbagai konsep dalam teori konstruktivisme dalam menganalisis tindakan Arab Saudi dan peran identitas agama yang dianutnya dalam kondisi anarki yang ditimbulkan oleh peristiwa *Arab Spring* yang terjadi di kawasan Timur Tengah.⁵⁵ **Berdasarkan analisis dalam tingkat domestik**, penulis menggunakan teori konstruktivis untuk mengulas pengaruh dari identitas Wahhabi terhadap tindak-tanduk yang dilangsungkan oleh Arab Saudi kepada Iran. Sehingga, penggunaan konsep *Collective Identity* dan *Collective Action* dalam pembahasan ini didasari oleh didengungkannya nilai identitas yang bersifat kolektif untuk menguatkan posisi dan eksistensi dari pengaruh negara Arab Saudi pada peristiwa *Arab Spring* di kawasan Timur Tengah.

⁵⁵ Dilip Hiro. *Cold War in the Islamic World: Saudi Arabia, Iran and the struggle for supremacy*. Oxford University Press. 2019.

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Hal ini disebabkan karena penulis memanfaatkan data yang diperoleh dari buku dan jurnal akademik serta teori atau konsep akademik untuk menganalisis fenomena dan peristiwa yang terkonstruksi secara sosial dan historis. Menurut John W. Creswell, dalam buku yang berjudul *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, metode penelitian yang bersifat kualitatif juga dapat menjelaskan makna dan perilaku yang dilakukan oleh suatu aktor dalam suatu penelitian.⁵⁶ Metode penelitian yang bersifat kualitatif dapat menjelaskan suatu fenomena sosial secara holistik, yang berarti melihat dan mengkaji suatu fenomena secara menyeluruh. Selain itu, metode kualitatif merupakan bentuk penelitian yang datanya diinterpretasikan berdasarkan penafsiran dari penulisnya, yang tentunya akan bersandar kepada pemahaman teori/konsep yang digunakan.

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan studi pustaka berupa buku dan jurnal sebagai suatu teknik dalam mengumpulkan data secara sekunder. Untuk itu, penulis menggunakan buku, jurnal, laman web, dan surat kabar, yang tidak dapat

⁵⁶ John W. Creswell dan J. David Creswell. *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications. 2017.

disebutkan satu per satu, yang dapat mendukung keabsahan penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan penalaran akademik secara induktif, yakni penalaran akademik yang berfokus kepada makna-makna tertentu dan memudahkan pemaparan masalah yang kompleks, yang didasari oleh sebuah pengamatan yang bersifat empiris, yaitu dengan menciptakan kesinergisan antara teori atau konsep yang digunakan dengan data yang dipaparkan dalam penelitian.⁵⁷

1.10 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **Bab I** sebagai bab pendahuluan, terdiri dari beberapa bagian yaitu; latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, dan linimasa penelitian.
- **Bab II** memuat substansi terkait pemaparan mengenai konsep Islamisme, Pan-Islamisme, dan juga Wahhabisme, sebagai identitas negara Arab Saudi di kawasan Timur Tengah, secara komprehensif.
- **Bab III** memuat pembahasan mengenai permusuhan antara Arab Saudi dan Iran yang disebabkan oleh nilai identitas masing-masing negara, khususnya

⁵⁷ *Ibid.*

pada peristiwa *Arab Spring* (2011-2016), serta motif kepentingan dari kedua negara tersebut.

- **Bab IV** memuat analisis terkait pengaruh yang ditimbulkan oleh Wahhabisme terhadap keterlibatan Arab Saudi dalam berkontestasi dengan Iran di kawasan Timur Tengah pada Peristiwa Arab Spring (2011-2016).
- **Bab V** memuat kesimpulan dari penelitian yang disusun oleh penulis.